

RINGKASAN

PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANGGOTA DPRD SE - JAWA TIMUR DALAM BIDANG POLITIK

Oleh : Aisyah Lilia Agustini

Realitas kehidupan di Jawa-Timur menunjukkan bahwa kaum perempuan masih jauh tertinggal dengan kaum laki-laki termasuk dalam bidang politik. Di DPRD Propinsi Jawa-Timur dan di DPRD Kabupaten dan Kota Se-Jawa-Timur hanya terdapat 5,3% dari jumlah 1685. Ditambah lagi dengan ketidakberdayaan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diakibatkan oleh berbagai kendala : budaya/ kultur, pendidikan dan sosio ekonomi.

Dalam penelitian ini akan menjawab seperti apa model pemberdayaan perempuan anggota DPRD se Jawa-Timur dalam bidang politik sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat dilaksanakan. Dengan metode survei , penelitian ini bermaksud menganalisis upaya pemberdayaan yang sudah dilakukan perempuan anggota DPRD di Jawa-Timur dalam meningkatkan peran politiknya, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi perempuan anggota DPRD di Jawa-Timur dan upaya mengatasi kendala tersebut

Dari populasi 90 orang, 89 diantaranya menjadi responden. Mereka adalah 10 orang anggota DPRD Propinsi Jawa-Timur dan 79 anggota DPRD Kabupaten dan Kota Se-Jawa-Timur selama September 2003 – April 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik yang selama ini berlangsung di kalangan Anggota DPRD di Jawa-Timur pada umumnya sedang.. Dibuktikan dengan pernyataan kurang setuju pada tiga tingkat pemerataan dan pernyataan setuju pada dua tingkat pada Kerangka Pemberdayaan Perempuan. Tingkat-tingkat pemberdayaan yang mendapat respon kurang setuju adalah Kesejahteraan, Partisipasi dan Kontrol. Sementara untuk tingkat Akses dan Penyadaran , sebagian besar responden memberi pernyataan setuju.

Sejumlah harapan disampaikan responden, yang umumnya berupa keinginan pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan baik dalam pendidikan, pemberian jabatan, dan dalam menerima aspirasi masyarakat. Harapan ini kemudian dibahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD). Dari forum FGD diperoleh mengenai harapan masyarakat , sesuai dengan teori , GBHN dan Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan sekaligus dapat dilakukan di DPRD di Jawa-Timur. Gambaran ini disebut sebagai model yang dikembangkan.

ABSTRACT

PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANGGOTA DPRD SE - JAWA TIMUR DALAM BIDANG POLITIK

By :

Aisyah Lilia Agustini

Women's empowerment in politic is must be done , although to improve her self in legislative women is not enough without supported situation. Because there are obstacles : culture, education and sosio economic.

It's analyzed by women's empowerment frame work, with SPSS program for window . Result showed women empowerment in medium category . It means three was't agree welfare, partisipation abd control. So access and coscentisation was agreed.

Such expectation is discuss in Focus Group Discussion . Description about women empowerment that expected by community, conform to GBHN, Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan and theory , and could be done by member legislative women were outcomes of the FGD. Such description are called "the developed empowerment model".

Key words : Women's empowerment, women's empowerment frame work, the developed empowerment model